

# I. PENDAHULUAN

## 1.1 Latar Belakang

Kesejahteraan menurut UU no 6 tahun 1974 adalah suatu tatanan kehidupan dan penghidupan sosial material maupun spiritual yang diliputi oleh rasa keselamatan, kesusilaan dan ketentraman lahir batin yang memungkinkan setiap warga negara memenuhi kebutuhan jasmani, rohani dan sosial. Rumah tangga yang sejahtera adalah rumah tangga yang mampu memenuhi kebutuhannya dengan tata cara yang mendasar.

Pengeluaran rumah tangga sebagai indikator untuk kesejahteraan rumah tangga stunting terdiri dari dua bagian, yaitu pengeluaran untuk kebutuhan pangan dan pengeluaran untuk kebutuhan non pangan. Pengeluaran pangan meliputi tindakan mengeluarkan pendapatan dalam mengkonsumsi bahan pangan yang berupa padi-padian, umbi-umbian, ikan/udang/cumi/kerang, daging, telur dan susu, sayur-sayuran, kacang-kacangan, buah-buahan, minyak dan kelapa, bahan minuman, bumbu-bumbuan, dan konsumsi lainnya seperti makanan dan minuman jadi serta rokok. Sementara itu, pengeluaran non pangan meliputi biaya untuk perumahan dan fasilitas rumah tangga, aneka barang dan jasa, pakaian, alas kaki dan tutup kepala, barang yang tahan lama, pajak, pungutan dan asuransi, keperluan pesta dan upacara (BPS, 2022).

Indonesia pengeluaran konsumsi pangan dan konsumsi non pangan menurut data Badan Pusat Statistik (2022), dalam 5 (lima) tahun terakhir tercatat bahwa pengeluaran konsumsi pangan di Indonesia dari tahun 2017 sampai dengan 2021 mengalami peningkatan sebesar Rp 94.889 (17,97%). Tahun 2017 pengeluaran konsumsi pangan sebesar Rp. 527.956/kapita/bulan, dan tahun 2021 pengeluaran konsumsi pangan sebesar Rp. 622.845/kapita/bulan, dan begitu juga dengan pengeluaran konsumsi non pangan. Tahun 2017 pengeluaran konsumsi non pangan sebesar Rp. 508.541/kapita/bulan, dan dari tahun 2021 pengeluaran konsumsi non pangan sebesar Rp. 641.744/kapita/bulan, dimana pengeluaran konsumsi non pangan dari tahun 2017 sampai dengan 2021 mengalami peningkatan sebesar Rp. 133.203 (26,19%). Bahwa dengan data pengeluaran konsumsi pangan dan pengeluaran konsumsi non pangan dapat diketahui GSR. GSR ini adalah salah satu untuk mengukur tingkat kesejahteraan, apabila  $GSR < 1$

artinya sangat Sejahtera, apabila  $GSR = 1$  artinya Sejahtera dan apabila  $GSR > 1$  artinya kurang Sejahtera. Di Indonesia  $GSR$  nya mengalami penurunan dimana  $GSR < 1$  yang artinya sangat sejahtera (Lampiran 1).

Provinsi Sumatera Barat pengeluaran konsumsi pangan dan pengeluaran konsumsi non pangan menurut data Badan Pusat Statistik (2022), dalam 5 (lima) tahun terakhir tercatat bahwa pengeluaran konsumsi pangan di Provinsi Sumatera Barat dari tahun 2017 sampai dengan 2021 mengalami peningkatan sebesar Rp. 83.984(14,38%). Tahun 2017 pengeluaran konsumsi pangan sebesar Rp. 584.045/kapita/bulan, dan tahun 2021 pengeluaran konsumsi pangan sebesar Rp. 668.029/kapita/bulan, dan begitu juga dengan pengeluaran konsumsi non pangan. Tahun 2017 pengeluaran konsumsi non pangan sebesar Rp. 469.758/kapita/bulan, dan dari tahun 2021 pengeluaran konsumsi non pangan sebesar Rp. 613.629 /kapita/bulan, dimana pengeluaran konsumsi non pangan dari tahun 2017-2021 mengalami peningkatan sebesar Rp. 143.871 (30,63%). Bahwa dengan data pengeluaran konsumsi pangan dan pengeluaran konsumsi non pangan dapat diketahui  $GSR$ .  $GSR$  ini adalah salah satu untuk mengukur tingkat kesejahteraan, apabila  $GSR < 1$  artinya sangat Sejahtera, apabila  $GSR = 1$  artinya Sejahtera dan apabila  $GSR > 1$  artinya kurang Sejahtera. Provinsi Sumatera Barat  $GSR$  nya mengalami Peningkatan dimana  $GSR > 1$  yang artinya kurang Sejahtera (Lampiran2).

Provinsi Sumatera Barat merupakan salah satu Provinsi di Indonesia yang mana pengeluaran konsumsi pangan Provinsi Sumatera Baratnya lebih tinggi dari pada Nasional. Provinsi Sumatera Barat tahun 2021 pengeluaran konsumsi pangan sebesar Rp. 668.029/kapita/bulan, sedangkan Nasional pengeluaran konsumsi pangan tahun 2021 sebesar Rp. 622.845/kapita/bulan. Dan untuk pengeluaran konsumsi non pangan Provinsi Sumatera Barat lebih rendah dari Nasional, tahun 2021 di Provinsi Sumatera Barat pengeluaran konsumsi non pangan sebesar Rp. 613.629 /kapita/bulan. Sedangkan tahun 2021 di Nasional sebanyak Rp. 641.744. Dari data tersebut mengindikasikan tingkat kesejahteraan di Provinsi Sumatera Barat kurang sejahtera dari Nasional (Lampiran 3).

Kabupaten Pesisir Selatan pengeluaran konsumsi pangan dan pengeluaran konsumsi non pangan menurut data Badan Pusat Statistik (2022), dalam 5 (lima)

tahun terakhir tercatat bahwa pengeluaran konsumsi pangan di Kabupaten Pesisir Selatan dari tahun 2017 sampai dengan 2021 berfluktuasi. Dimana tahun 2017 sampai tahun 2018 mengalami peningkatan sebesar 47.555 (9,16%) kemudian pada tahun 2018 sampai tahun 2019 mengalami penurunan sebesar 3.712 (0,65%) kemudian pada tahun 2019 sampai dengan tahun 2020 mengalami peningkatan sebesar 34.844 (6,19%) kemudian pada tahun 2020 sampai tahun 2021 mengalami penurunan sebesar 21.479 (3,59%). Sedangkan untuk pengeluaran konsumsi non pangan dari tahun 2017 sampai 2020 mengalami peningkatan sebesar Rp. 117.082(30,05%). Dan dari tahun 2020 ke 2021 itu mengalami penurunan sebesar Rp. 47.232(9,32%). Bahwa dengan data pengeluaran konsumsi pangan dan pengeluaran konsumsi non pangan dapat diketahui GSR. GSR ini adalah salah satu untuk mengukur tingkat kesejahteraan, apabila  $GSR < 1$  artinya sangat Sejahtera, apabila  $GSR = 1$  artinya Sejahtera dan apabila  $GSR > 1$  artinya kurang Sejahtera. Di Pesisir Selatan GSR nya mengalami Peningkatan dimana  $GSR > 1$  yang artinya kurang sejahtera (Lampiran 4).

Kabupaten Pesisir Selatan merupakan salah satu Kabupaten di Provinsi Sumatera Barat yang pengeluaran konsumsi pangan di Kabupaten Pesisir Selatan lebih rendah dari Provinsi Sumatera Barat yaitu tahun 2021 di Kecamatan Pesisir Selatan sebanyak Rp. 576.013/perkapita/bulan, sedangkan Provinsi Sumatera Barat pengeluaran konsumsi pangan sebesar Rp. 668.029/kapita/bulan. Dan untuk pengeluaran konsumsi non pangan di Kabupaten Pesisir Selatan lebih rendah dari Provinsi Sumatera Barat, tahun 2021 pengeluaran konsumsi non pangan di Kabupaten Pesisir Selatan sebesar Rp. 613.629 /kapita/bulan, sedangkan di Provinsi Sumatera Barat tahun 2021 pengeluaran konsumsi non pangan sebanyak Rp. 613.629/kapita/bulan. Bahwa dengan data pengeluaran konsumsi pangan dan konsumsi non pangan dapat diketahui GSR. Dari data tersebut tingkat mengindikasikan kesejahteraan di Kabupaten Pesisir Selatan dan Provinsi Sumatera Barat kurang sejahtera (Lampiran 5).

Menurut Muflikhati (2010), semakin tinggi tingkat pendapatan maka persentase pengeluaran rumah tangga untuk konsumsi pangan akan mengalami penurunan. Berdasarkan teori klasik ini maka keluarga dapat dikatakan sejahtera apabila persentase pengeluaran untuk konsumsi pangan jauh lebih rendah dari

pada pengeluaran non pangan. Artinya, setiap tambahan pendapatan yang diperoleh akan dialokasikan untuk memenuhi kebutuhan non pangan karena kebutuhan pangan yang sudah terpenuhi dan sifat kebutuhan pangan mempunyai batasan tersendiri sedangkan kebutuhan non pangan relatif tidak terbatas.

Ketahanan Pangan selalu menjadi prioritas karena menyangkut urusan kebutuhan dasar dan menjadi penompang pertumbuhan Ekonomi Nasional. Rumah tangga dapat dikategorikan sejahtera apabila proporsi pengeluaran untuk kebutuhan pokok sebanding atau lebih rendah dari proporsi pengeluaran untuk kebutuhan bukan pokok. Sebaliknya rumah tangga pengeluaran untuk kebutuhan pokok lebih besar dibandingkan dengan pengeluaran untuk kebutuhan bukan pokok, maka dapat dikategorikan rumah tangga tersebut tidak sejahtera. Adakalanya menimbulkan *stunting*.

WHO (2015) *stunting* adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang, yang ditandai dengan Panjang atau tinggi badannya berada di bawah standar. *Stunting* adalah masalah gizi utama yang akan berdampak pada kehidupan sosial dan ekonomi dalam masyarakat. Ada bukti jelas bahwa individu yang *stunting* memiliki tingkat kematian lebih tinggi dari berbagai penyebab dan terjadinya terjadinya peningkatan penyakit. *Stunting* akan mempengaruhi kinerja pekerjaan fisik dan fungsi mental dan intelektual akan terganggu (Mann dan Truswell, 2002).

Kasus *stunting* di Kecamatan Batang Kapas Kabupaten Pesisir Selatan Provinsi Sumatera Barat pada Bulan Mei tahun 2023 kasus *stunting* yang ada sebanyak 130 kasus, di antara kasus *stunting* tersebut ada yang bermata pencarian sebagai petani, buruh tani, nelayan, dan swasta lainnya (Lampiran 6). Jenis pekerjaan diduga erat kaitannya dengan tingkat kesejahteraan. Oleh karena itu dilakukan kajian bagaimana tingkat kesejahteraan rumah tangga yang anggota keluarganya mengalami kejadian *stunting*.

Kondisi *stunting* jika berlanjut maka akan membuat rendahnya kualitas generasi masa depan. Padahal masa bergantung kepada generasi penerus yang saat ini mungkin masih balita, tetapi 30 atau 40 tahun ke depan, balita yang sekarang akan menjadi pemimpin bangsa. Untuk itu penulis telah melakukan penelitian tentang tingkat kesejahteraan rumah tangga *stunting* yang dilihat dari pendekatan

GSR dan faktor-faktor apa yang mempengaruhi kesejahteraan tersebut. Sehingga dari hasil penelitian ini dapat menjadi pertimbangan dalam menyusun program pengentasan *stunting* dari wilayah ini.

Berdasarkan hal tersebut maka penulis telah melakukan penelitian tentang **“Kesejahteraan Rumah Tangga *Stunting* dari Pendekatan GSR di Kecamatan Batang Kapas Kabupaten Pesisir Selatan”**.

### **1.2. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana tingkat kesejahteraan rumah tangga *stunting* dari pendekatan GSR di Kecamatan Batang Kapas Kabupaten Pesisir Selatan?
2. Faktor-faktor apa yang mempengaruhi tingkat kesejahteraan rumah tangga *stunting* di Kecamatan Batang Kapas Kabupaten Pesisir Selatan.

### **1.3. Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk:

1. Mengetahui tingkat kesejahteraan rumah tangga *stunting* dari pendekatan GSR di Kecamatan Batang Kapas Kabupaten Pesisir Selatan.
2. Menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kesejahteraan rumah tangga *stunting* di Kecamatan Batang Kapas Kabupaten Pesisir Selatan.

### **1.4. Manfaat Penelitian**

Manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Bagi dinas terkait, penelitian ini bermanfaat untuk informasi awal tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kesejahteraan rumah tangga *stunting* di Kecamatan Batang Kapas Kabupaten Pesisir Selatan, dalam rangka menyusun kebijakan/program peningkatan kesejahteraan rumah tangga sekaligus pengentasan *stunting* di daerah ini.
2. Bagi pembaca dan pihak lain, penelitian ini dapat berguna sebagai bahan rujukan atau sumber informasi bagi penulis lainnya yang melakukan penelitian terkait dengan tema ini



